

Kajian Yuridis Pengaturan Denda Terhadap Notifikasi Merger dan Akuisisi Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 01/KPPU-M/2019) = Juridical Study on Fines Regulations on Merger and Acquisition Notifications to the Business Competition Supervisory Commission (Decision Study Number 01/KPPU-M/2019)

Ariffan Rahman Hakim, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920557061&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini membahas tentang adanya besaran pengenaan denda berbeda dalam kasus yang sama akibat keterlambatan menyampaikan notifikasi merger dan akuisisi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pada perkara PT Citra Prima Sejati dan PT Lumbung Capital yang merupakan sama-sama perusahaan yang dikendalikan oleh PT Bumi Resource, Tbk. Secara khusus penulis membahas pada perkara PT Citra Prima Sejati sebagai bahan analisis dari penilaian Komisi dalam memutus denda keterlambatan notifikasi pada Putusan Nomor 01/KPPU-M/2019 adanya pengenaan denda sebesar Rp. 10.330.000.000,- yang terdapat perbedaan pengenaan denda pada perkara PT Lumbung Capital dikenakan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,-. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (legal research) dan pendekatan peraturan (statute approach) yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terjadinya peningkatan keterlambatan notifikasi akibat ketidaktahuan dan kesalahpahaman dari kewajibannya menyampaikan notifikasi, sebaiknya Komisi lebih mementingkan pertimbangan denda dapat meringankan akibat sosialisasi yang belum meluas kepada pelaku usaha dan perlunya membuat peraturan pengenaan denda keterlambatan notifikasi yang tidak terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan presentase berdasarkan hasil transaksi dan/atau hasil keuntungan dari pihak yang mengambil-alih. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan serta aturan turunan Peraturan Komisi Nomor 4 tahun 2012 belum mengatur parameter dalam pengenaan denda dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum.

.....This thesis discusses the existence of different fines in the same case due to delays in submitting merger and acquisition notifications to the Business Competition Supervisory Commission, in the case of PT Citra Prima Sejati and PT Lumbung Capital which are both companies controlled by PT Bumi Resource, Tbk. In particular, the author discusses the PT Citra Prima Sejati case as an analysis material from the Commission's assessment in deciding the late notification fine in Decision Number 01/KPPU-M/2019 the imposition of a fine of Rp. 10,330,000,000, for which there is a difference in the imposition of fines in the case of PT Lumbung Capital, a fine of Rp. 1,200,000,000,-. This study uses a normative (legal research) and a regulatory approach (statute approach) which are analyzed qualitatively. Based on the results of the study that there was an increase in notification delays due to ignorance and misunderstanding of its obligation to deliver notifications, the Commission should prioritize the consideration of fines that can alleviate the consequences of socialization that have not been widespread to business actors and the need to make regulations for imposing late notification fines that do not occur monopolistic practices and/or competition unhealthy business with a percentage based on transaction results and/or profits from the party taking over. As in Government Regulation No. 57 of 2010 and Commission Regulation No. 4 of 2012 has not set the parameters in the imposition of fines in an effort to provide justice and legal certainty.